

Banggar DPRD Kukar Berikan Rekomendasi



Sumber gambar : www.dprdkutaikartanegara.go.id

Legislatif Sahkan Pertanggungjawaban APBD 2023

TENGGARONG – DPRD Kukar telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2023 menjadi Perda.

Ini disampaikan Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Abdul Rasid saat memimpin Rapat Paripurna ke-12 Masa Sidang III di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Senin (1/7/2024).

Rasid menuturkan, Pertanggungjawaban APBD 2023 sudah matang digodok. Ini merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi DPRD bersama Pemkab Kukar kepada masyarakat dalam mengelola keuangan daerah.

Ia berharap, apa yang menjadi catatan dari legislatif menjadi perbaikan eksekutif agar penggunaan anggaran di tahun 2024 ini optimal untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Kukar.

"Tentu kami telah memberikan masukan dan rekomendasi legislatif. Ini harus menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi agar pengelolaan anggaran ke depan lebih baik," kata Politisi Partai Golkar itu.

Sebagai informasi, penyampaian pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 memuat laporan keuangan yang meliputi laporan dan realisasi anggaran, neraca laporan arus kas, catatan laporan keuangan serta dilampiri laporan kinerja yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)ⁱ.

Selain itu, berisikan ikhtiar laporan keuangan badan usaha milik daerah, perusahaan daerah sebagaimana telah disampaikan melalui nota penjelasan pemerintah pada Rapat Paripurna ke-9 Masa sidang III yang telah melalui beberapa tahapan.

Laporan tersebut kemudian mendapat pandangan umum dari seluruh fraksi DPRD Kukar pada Rapat Paripurna ke-10. Setelahnya pandangan umum fraksi mendapatkan tanggapan pemerintah pada Paripurna ke-11.

Terakhir, laporan tersebut dimatangkan oleh DPRD Kukar melalui Badan Anggaran atau Banggar. Mereka, pada akhirnya menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna ke-12. **(Ad- vertorial/aul)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Banggar DPRD Kukar Berikan Rekomendasi, 03/07/24
2. Kaltim.tribunnews.com, DPRD Kukar Setujui dan Sahkan Pertanggungjawaban APBD 2023 jadi Perda 02/07/24
3. Prokal.co, Pemkab DPRD Kukar Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2023, 02/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 berupa laporan keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan
2. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2) Perda Kukar 3/2023 diatur bahwa, Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

ⁱ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.